

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERAMPOKAN  
YANG DISERTAI DENGAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN  
PASAL 365 KUHP  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta  
No.97/Pid.b/2017/PN.Skt)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**WIDHI PRASETYO UTOMO**  
**C100140052**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERAMPOKAN  
YANG DISERTAI DENGAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN  
PASAL 365 KUHP**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta  
No.97/Pid.b/2017/PN.Skt)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**WIDHI PRASETYO UTOMO**  
**C100140052**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

**(Hartanto, S.H, M.Hum)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI DENGAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 365 KUHP

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta  
No.97/Pid.b/2017/PN.Skt)

Oleh:

**WIDHI PRASETYO UTOMO**  
C100140052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

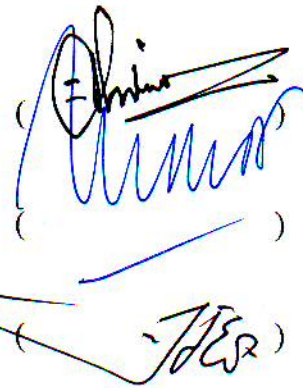
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 18 Juli 2018

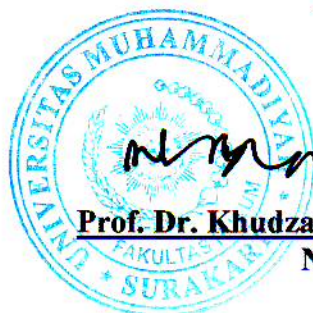
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



**Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.**

NIK. 537

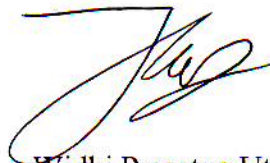
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 Juli 2018

Penulis



Widhi Prasetyo Utomo  
C100140052

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERAMPOKAN  
YANG DISERTAI DENGAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN  
PASAL 365 KUHP**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta  
No.97/Pid.b/2017/PN.Skt)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong pelaku melakukan perbuatan tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan tindak pidana perampokan yang disertai penganiayaan (ancaman kekerasan). Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni putusan dan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, dokumentasi dan wawancara, kemudian data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana yakni minimnya pendidikan dan agama (internal) dan faktor ekonomi, lingkungan dan penegakan hukum (eksternal). Bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 365 dan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih diatur Pasal 363 KUHP. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perbuatan tindak pidana berdasar pertimbangan yuridis yaitu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun dalam proses pemeriksaan perkara lainnya, seperti keterangan saksi, ahli (jika diperlukan), keterangan terdakwa, dan keterangan korban, sedangkan pertimbangan non-yuridis yakni karena desakan ekonomi keluarga dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

**Kata kunci:** tinjauan yuridis, perampokan, penganiayaan (ancaman kekerasan)

**Abstract**

This study aims to determine the factors that encourage perpetrators to commit criminal acts and forms of criminal responsibility according to Article 365 of the Criminal Code (KUHP) and judges' consideration in deciding criminal acts of robbery accompanied of maltreatment (threat of violence). Research method with normative juridical approach which is descriptive. The data source consists of primary data, namely decision and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary law sources. Methods of data collection through literature study, field study, documentation and interview, then the data were analyzed with qualitative analysis. The results showed that the factors that encourage the perpetrators in doing the criminal acts that lack of education and religion (internal) and economic factors, environment and law enforcement (external). The form of criminal liability is regulated in Article 365 and if the act is committed by two or more persons regulated Article 363 of the Criminal Code. The judges' consideration in deciding cases of criminal acts based on juridical considerations are facts revealed in court and in the process of examination of other cases, such as witness statements, expert (if necessary), statement of defendant, and victim's statement, while non-juridical consideration family economic insecurity and no permanent employment.

**Keywords:** juridical review, robbery, mistreatment (threat of violence)

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang dalam era sekarang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dan memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada Alenia ke-4. Hal ini dapat diwujudkan apabila masyarakat memiliki rasa kesadaran yang tinggi dalam bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Hal ini dapat dikatakan bahwa ciri masyarakat sejahtera tersebut adalah apabila masyarakat memiliki tingkat perekonomian menengah ke atas dan menciptakan kondisi keamanan yang harmonis, selain itu tujuan tersebut juga dapat tercapai dengan cara lain seperti setiap masyarakat berperilaku serasi sesuai kepentingan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan bertingkah laku sesuai norma yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari.

Namun belakangan ini dengan terpuruknya kondisi perekonomian memunculkan sejumlah perbuatan kejahatan yang di mana perbuatan kejahatan tersebut merupakan suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana.<sup>1</sup> Hal ini dapat di buktikan dengan meningkatnya kasus kejahatan di dalam kehidupan sehari-hari, dengan meningkatnya jumlah kasus kejahatan karena dipicu oleh banyaknya angka pengangguran di negara Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan di dalam masyarakat, Dalam hal ini masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, cenderung tidak mepedulikan norma dan kaidah hukum yang berlaku, dengan melihat kondisi seperti ini guna memenuhi kebutuhan yang ada masyarakat sering menggunakan berbagai cara, cara yang digunakan tersebut adalah cara yang benar maupun cara yang salah, tapi dengan melihat kultur atau budaya yang terdapat di dalam kondisi masyarakat sekarang kebanyakan masyarakat menggunakan cara yang salah karena digunakan sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya, dan salah satu bentuk kejahatan yang sedang ramai diperbincangkan adalah kejahatan pencurian, dengan berkembangnya tindak pidana pencurian berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, sering kita melihat kasus kejahatan pencurian di kalangan masyarakat bahkan perbuatan pencurian tersebut terkadang sampai melukai korbannya.

---

<sup>1</sup>Mr. W.A. Bonger, 1995. *Pengantar Tentang Kriminolog*, Jakarta: PT. Pembangunan, hal. 19.

Seperti contoh kasus yang terjadi di kota Surakarta yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 yang bertempat di Kios PS 3 Jln. KH Maskur Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta yang di mana telah terjadi perbuatan pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Bambang Purnomo alias Culing yang dibantu oleh ketiga temannya yang bernama Heru alias Gembos, Nanang alias Gembus dan Amik Sihono terhadap Ruko Kios milik Andro Reynald Kristama dan Pamungkas Aji Nugroho, dalam hal ini peristiwa tersebut terjadi saat kedua saksi tersebut menjaga ruko kios tersebut tiba-tiba terdakwa datang dengan ketiga orang temannya dengan membawa senjata tajam yang dipergunakan untuk mengancam kedua saksi tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi yang bernama Androm Reynald Krisnatama untuk masuk ke kamar mandi, sementara saksi Pamungkas Aji Nugroho sempat menangkis senjata tajam milik terdakwa tersebut tetapi tangan saksi langsung diikat oleh teman terdakwa yang bernama Nanang alias Gembus dengan lakban, dengan mulut tertutup dan juga disuruh tiarap. Kemudian terdakwa setelah menyekap saksi tersebut terdakwa langsung mengambil barang-barang yang terdapat di dalam kios tersebut yang berupa: 1 unit LCD merk Toshiba, 2 unit LCD merk KOKA, 2 unit LCD merk TCL, 1 unit laptop merk ASSUS, 1 buah Hp merk Evercross, 1 buah Hp merk Blackberry, 1 buah mesin Play Station, Dompot berisi uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan uang setoraan PS Rp 1.100.0000,- (Satu Jutas Seratus Riubu Rupiah). Setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa beserta ketiga orang temannya pergi.<sup>2</sup>

Berdasarkan contoh kasus di atas dalam hal ini pelaku seharusnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan ketentuan perbuatan tindak pidana pencurian yang disertai dengan penganiayaan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan diatur di dalam Pasal 365 ayat 2 dan diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun.<sup>3</sup> Namun penerapan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dapat meringankan ataupun memberatkan terdakwa karena hakim juga akan melihat jenis pidana apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dan berapa lama hukuman yang akan

---

<sup>2</sup>Putusan Pengadilan Negeri Kota Surakarta Kelas 1 A No. 97/Pid.B/2017/PN.Skt.

<sup>3</sup>Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hal. 14.

diberikan, dari faktor-faktor itulah yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan karena hakim memiliki penafsiran berbeda-beda terhadap undang-undang atau norma yang berlaku. Dengan penafsiran hakim yang berbeda-beda pastinya penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim sudah seadil-adilnya dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berpedoman terhadap beberapa aspek yaitu aspek terdakwa, aspek masyarakat dan aspek-aspek lain, selain itu hakim tentu juga akan melihat bahan pertimbangan yang bersumber dari KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dijadikan dasar pertimbangan secara matang.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim adalah sebuah bentuk tanggung jawab dalam menjatuhkan putusan, dan hakim seharusnya memiliki rasa keadilan yang sebanding meskipun memiliki penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut berbeda-beda, dikatakan bahwa di dalam hukum pidana sendiri memiliki dasar bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>4</sup> Asas ini merupakan satu asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia, asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan, dengan bercermin pada asas tersebut maka selayaknya hakim juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi si korban mengingat hukum pidana itu sendiri adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi tentang keharusan-keharusan dan larangan-larangan (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan oleh suatu sanksi dan hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, penulis bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan), dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku perbuatan tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) menurut Pasal 365 KUHP, serta bagaimana hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara perbuatan tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan).

---

<sup>4</sup>Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 23.

<sup>5</sup>P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 3.



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: (1) Manfaat teoritis, yakni (a) dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana di Indonesia terutama mengenai upaya perbuatan tidak pidana perampokan yang disertai penganiayaan (ancaman kekerasan) yang kerap terjadi di Indonesia, dan (b) mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti; (2) Manfaat praktis, yakni (a) mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan), dan (b) memberikan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai penanganan utama dan metode induktif sebagai tata cara penunjang.<sup>6</sup> Jenis penelitian bersifat deskriptif, dimana laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terhadap penyajian laporan tersebut.<sup>7</sup> Sumber data terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>8</sup>, berupa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan data sekunder adalah sumber tertulis yang mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan atau lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan berdasarkan Pasal 365 KUHP. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, studi dokumen dan wawancara, selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 166.

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosada Karya, hal. 6.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 30.

<sup>9</sup> Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor yang Mendorong Pelaku dalam Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Perampokan yang Disertai dengan Penganiayaan (Ancaman Kekerasan)**

Mengenai tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) secara pengaturan hukum normatif, perbuatan tersebut diatur di dalam KUHP yang termuat di dalam Pasal 365 ayat (2). Pasal ini menjelaskan tentang pengaturan secara normatif perbuatan pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan).

Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan perbuatan tindak pidana harus juga didasarkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana karena unsur-unsur inilah yang akan dapat dijadikan dasar mengenai faktor-faktor pemicu atau pendorong seseorang dalam melakukan perbuatan pidana, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Bab 2 bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi: (1) Kelakuan dan akibat; (2) Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai; (3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) Unsur melawan hukum secara objektif; dan (5) Unsur melawan hukum secara subjektif.<sup>10</sup> Apabila kelima unsur dapat terpenuhi maka pengaturan terhadap hukum normatif yang mengatur tentang tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) dapat diberlakukan. Unsur-unsur tersebut dipandang sebagai faktor penyebab para pelaku perampokan yang disertai penganiayaan dapat dianggap melakukan perbuatan pidana.

Menurut Hakim Heru Dudyanto terdapat dua faktor yang menjadi latar belakang munculnya perbuatan kriminal atau tindakan kejahatan, yaitu pertama, faktor internal seseorang, pribadi atau *person* yang terdapat di dalam dirinya. Kedua, faktor eksternal yang berasal dari luar seseorang, pribadi atau *person*. Faktor internal terdiri dari: (1) Faktor pendidikan, di mana banyak pelaku kejahatan, termasuk pelaku tindak pidana perampokan yang perbuatannya diikuti dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) terhadap korbannya tersebut memiliki pendidikan hanya sampai tamat SD, SMP atau SMA saja, dan mereka biasanya tidak mau melanjutkan pendidikan mereka dengan berbagai alasan. Sehingga banyak para pelaku perampokan yang perbuatannya diikuti dengan perbuatan

---

<sup>10</sup>Moeljanto, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hal. 58.

penganiayaan tersebut 50% adalah anak-anak; (2) Faktor agama, dimana sebagai faktor penentu apakah dengan seseorang individu dalam melakukan perbuatan kejahatan takut dengan dosa atau tidak karena perbuatan tersebut dilarang oleh agama dalam hal ini menurutnya banyak para pelaku kriminalitas pada jaman sekarang sering tidak mengindahkan hukum yang sudah diatur di dalam agama, karena seseorang menganggap bahwa mencari rejeki melalui jalan yang salah itu lebih mudah daripada mencari rejeki melalui jalan yang benar.<sup>11</sup>

Selain faktor internal, faktor-faktor yang mendorong timbulnya perbuatan kriminalitas juga dapat dilihat dari faktor eksternal dalam diri seorang individu tersebut, yaitu terdiri dari: (1) Faktor ekonomi, yakni tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya, maka dia melakukan pekerjaan apa saja termasuk pekerjaan kriminal guna mendapatkan uang; (2) Faktor lingkungan, dimana orang yang lahir di dalam kondisi lingkungan orang-orang yang suka melakukan perbuatan kriminalitas, maka jangan pernah salahkan kelak orang tersebut akan menjadi seorang yang juga berbuat kriminal; (3) Faktor penegakan hukum, dimana upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan sampai di tingkat akhir yaitu Hakim dalam pengadilan sudah maksimal dalam menanggulangi para pelaku tindak pidana. Akan tetapi dengan diancamnya para pelaku dengan hukuman penjara saja dan biasanya hukuman yang dijatuhkan relatif ringan, para pelaku tersebut tidak jera. Setelah pelaku keluar dari penjara bisa jadi dia akan melakukan perbuatan kriminal lagi, karena mereka menganggap hukuman penjara itu adalah hukuman yang paling ringan dan mudah. Hal ini terjadi dari banyaknya pelaku kriminalitas atau pelaku tindak pidana banyak yang keluar masuk penjara lebih dari sekali.<sup>12</sup>

### **3.2 Pertanggungjawaban Pidana yang Dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana Perampokan**

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Pasal tersebut secara umum mengatur tentang

---

<sup>11</sup>Heru Dudyanto, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 30 April 2018, pukul 09.00 WIB.

<sup>12</sup>Heru Dudyanto, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 30 April 2018, pukul 09.00 WIB.

bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan), akan tetapi untuk pengaturan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) lebih spesifik diatur di dalam Pasal 365 ayat 2, maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) dihukum penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Untuk bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, diatur di dalam Pasal 363. Dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) dapat dijerat di dalam Pasal 363 ayat (1).

Teori asas hukum pidana menganut 2 asas yang dapat disebut dengan asas pertanggungjawaban pidana yang di mana asas tersebut menjatuhkan sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada si pelaku tindak pidana, asas tersebut terdiri dari: (1) Asas *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak), yaitu suatu tanggungjawab yang memandang ‘*kesalahan*’ di sini menjelaskan bahwa si pembuat atau pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dia lakukan<sup>13</sup>; (2) Asas *vicarious liability* (pertanggung-jawaban pengganti), dimana pertanggung-jawaban pengganti yang dijatuhkan kepada seseorang yang di mana akibat suatu perbuatan yang secara melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan.<sup>14</sup>

Menurut Hakim Heru Dudyanto berkaitan dengan penjatuhan hukuman atas kejadian tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial BS Alias Culing yang teman-temannya tersebut bentuk pertanggungjawaban akan tetap dijatuhkan pasal yang sudah diatur di dalam KUHP yaitu Pasal 365 ayat 2 dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan selain itu perbuatan perampokan tersebut juga telah dilakukan secara bersama-sama dengan dilakukan

---

<sup>13</sup>Andriansyah, (2016) “Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak ( *Stricht Liability*) dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Januari, Tahun 2016, hal. 4.

<sup>14</sup>Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, (2016) “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Nomor 2, Januari 2016, hal. 34.

oleh BS dengan ketiga temannya juga terkait Pasal 363 ayat 1 ke 4 dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya, hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dipilih salah satu dari unsur perbuatan tersebut yang benar-benar terbukti pelaku melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi hakim juga akan melihat bahwa perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sendirian melainkan dilakukan oleh terdakwa dan ketiga orang temannya yang nantinya juga akan berpengaruh pada saat penjatuhan putusan.<sup>15</sup>

Menurut penulis bentuk pertanggungjawaban kepada terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana perampokan yang disertai dengan perbuatan penganiayaan, yang di mana jika kita melihat teori pertanggungjawaban pidana sendiri diterapkan dengan menggunakan asas *strict liability* dan *vicarious liability* tidak sesuai dengan bentuk pertanggungjawaban pidana yang termuat di dalam KUHP karena asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* sendiri memandang bahwa tanggung jawab tersebut dilihat dari sebuah kesalahan dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan, akan tetapi di dalam hukum pidana sendiri perbuatan tindak pidana belum tentu dapat dipandang sebagai perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh individu.

### **3.3 Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Perampokan yang Disertai dengan Penganiayaan (Ancaman Kekerasan)**

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah sebuah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus sebuah perkara. Berkaitan dengan itu dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni:

*Pertama*, pertimbangan yuridis, yakni didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat di dalam putusan, pertimbangan- pertimbangan

---

<sup>15</sup>Heru Dudyanto, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 30 April 2018, pukul 09.00 WIB.

yuridis ini terungkap lewat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga tuntutan dari jaksa penuntut umum.<sup>16</sup> Di sini hakim dalam menentukan pertimbangan yang pertama berdasarkan dari isi dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, dalam hal ini terungkap bahwa di dalam isi dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang termuat di dalam putusan No. 97/Pid.B/2017/ PN.Skt ada dua unsur dakwaan dimana unsur yang pertama disebut dengan unsur dakwaan primair, di dalam unsur dakwaan primair tersebut jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa yang bernama BP alias Culing dengan ketiga orang temannya yang bernama HR alias Gembos, NN alias Gembus, dan AS telah melakukan perbuatan pidana yang berupa tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan). Selanjutnya bentuk pertimbangan yuridis yang kedua yaitu dilihat melalui keterangan terdakwa dan juga keterangan saksi, sesuai dengan yang terdapat di dalam putusan No. 97/Pid.B/2017/PN.Skt. Bahan pertimbangan yuridis yang ketiga melalui tuntutan, sesuai yang terdapat di dalam putusan No. 97/Pid.B/2017/ PN.Skt. bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan tuntutan sebagai berikut: (a) Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perampokan disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) sesuai yang telah didakwakan pada dakwaan primer; (b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun dan dikurangi selama berada dalam masa tahanan sementara; (c) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

*Kedua*, pertimbangan non yuridis, yaitu dapat dilihat dari latar belakang terdakwa apakah terdakwa yang di mana dalam hal ini berkaitan dengan kondisi dari faktor intern dan ekstern dari terdakwa tersebut yang di mana faktor intern dan ekstern dalam hal ini yang termasuk ke dalam faktor intern dari terdakwa meliputi faktor kejiwaan dari terdakwa dengan adanya faktor dari kejiwaan terdakwa maka dapat disimpulkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia telah lakukan atau tidak, selain itu ada faktor

---

<sup>16</sup>Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 212.

agama dan juga faktor pendidikan, yang kedua faktor ekstern. Hal ini terkait dengan faktor-faktor yang terdapat di luar dari faktor intern.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan faktor pertimbangan non yuridis hal ini dapat dilihat dari faktor intern dari terdakwa, sesuai yang termuat di dalam putusan No. 97/Pid.B/2017/PN.Skt dalam hal ini terungkap pada pemeriksaan keterangan terdakwa di dalam terdakwa memaparkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa juga beragama Islam dan memiliki pendidikan yang cukup baik karena saat memberikan keterangannya salah satu terdakwa yang bernama BP alias Culing mengaku memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta.

Menurut Hakim Heru Dudyanto bahwa terkait dengan faktor intern dia menilai bahwa terdakwa dianggap sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia telah lakukan bersama dengan ketiga orang temannya, hal ini hakim akan melihat bahwa batas orang yang mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu berumur 16 tahun hal ini sudah diatur di dalam KUHP, selain itu hakim juga melihat pada saat proses keterangan dari terdakwa yang di mana terdakwa mengaku bahwa dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dijadikan landasan bagi hakim untuk menentukan bahwa terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam hal berkaitan dengan faktor intern dari terdakwa yang terungkap dari fakta persidangan hal ini akan menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban yang memberatkan bagi si pelaku tersebut yang di mana pelaku sudah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang diatur dengan undang-undang.<sup>18</sup>

Sementara itu, faktor ekstern yang berkaitan dengan pertimbangan non yuridis dalam hal ini dapat berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan dan juga faktor penegakan hukum, dalam hal ini termuat di dalam putusan No. 97/Pid.B/2017/PN.Skt yang terungkap pada saat pemeriksaan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) yang dilakukan dengan ketiga orang temannya didasarkan karena keadaan faktor ekonomi yang sedang tidak stabil. Selain dari faktor ekonomi, hal yang berkaitan dengan faktor non

---

<sup>17</sup>Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara .....*, *Op.Cit*, hal. 212.

<sup>18</sup>Heru Dudyanto, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 30 April 2018, pukul 09.00 WIB.

yuridis yang terdapat di dalam faktor ektern mencakup lingkungan dan penegakan hukum, hal ini sesuai yang terungkap pada saat pemeriksaan keterangan terdakwa yang termuat di dalam putusan No 97/Pid.B/2017/PN.Skt bahwa terdakwa bertempat tinggal di Kampung Joyotakan, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Pada tempat tersebut kondisi lingkungannya sangat buruk terbukti bahwa tempat tersebut sering kali terjaring razia, dan tidak hanya pada kejahatan perampokan saja akan tetapi terdapat kejahatan-kejahatan lain.<sup>19</sup>

Mengenai bahan pertimbangan untuk meringankan penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, yaitu hal-hal yang meringankan hal ini termuat di dalam putusan No. 97/Pid.B/2017/PN.Skt bahwa terdakwa yang bernama BP alias Culing dengan ketiga orang temannya, pada saat proses persidangan terdakwa mau mengakui atas perbuatannya sehingga pada saat proses pemeriksaan di pengadilan terdakwa tidak mempersulit keadaan, selain itu terdakwa juga menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan bersama dengan ketiga orang temannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Sementara menurut penulis bahwa hakim dalam menjatuhkan sebuah bentuk pertanggungjawaban dengan melihat dasar-dasar pertimbangan yuridis maupun non yuridis dan juga dilihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sudah sesuai dengan nilai-nilai rasa keadilan yang dimiliki oleh hakim tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban, karena sebuah pertimbangan tersebut merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, oleh sebab itu di sinilah fungsi hukum yang sesungguhnya, yang di mana fungsi hukum yang sesungguhnya adalah untuk memberikan efek jera (upaya refresif) bagi pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana ketika upaya preventif (pencegahan) sudah tidak bisa dilakukan.

---

<sup>19</sup>Heru Dudyanto, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 30 April 2018, pukul 09.00 WIB.



## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dari individu (person) yang berupa pendidikan dan agama, dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri inidividu) yang berupa faktor ekonomi, lingkungan dan penegakan hukum.

*Kedua*, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perampokan yang disertai penganiayaan (ancaman kekerasan) diatur dalam KUHP. KUHP mengatur pertanggungjawaban tersebut dalam Pasal 365 KUHP. Lalu jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka pertanggungjawaban pidananya terdapat padal Pasal 363 KUHP.

*Ketiga*, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perampokan yang disertai penganiayaan (ancaman kekerasan). Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, hakim mengemukakan terdapat dua pertimbangan yang digunakan yaitu, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan maupun dalam proses pemeriksaan perkara lainnya, seperti keterangan saksi, ahli (jika diperlukan), keterangan terdakwa, keterangan korban. Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa dan melihat faktor atau alasan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Seperti dalam putusan No.97/Pid.B/2017/ PN.Skt. pelaku melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi keluarga dan faktor terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.

### **4.2 Saran**

*Pertama*, kepada Pemerintah Republik Indonesia agar memberikan upaya preventif dan refresif kepada setiap warganya supaya akan kriminalitas di dalam lingkungan masyarakat tidak meningkat dari tahun ke tahun dan juga diharapkan negara dapat mensejahterakan kehidupan warga negaranya, karena perbuatan kriminalitas tersebut muncul dari kehidupan rakyat yang kurang sejahtera.

*Kedua*, kepada para aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah perbuatan kriminalitas seperti tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) lebih ditekankan lagi bukan hanya terhadap upaya represif (hukuman) saja yang digunakan untuk menjerakan seseorang supaya tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi masih ada cara lain yang dapat digunakan untuk menjerakan seseorang supaya tidak melakukan perbuatan kriminalitas tersebut salah satunya dengan menggunakan upaya preventif yang digunakan untuk mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, upaya preventif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang akan ditimbulkan akibat perbuatan kriminalitas, dan juga hukuman berat yang akan dijatuhkan dengan ini diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat dapat menjadi takut untuk melakukan perbuatan kriminalitas.

*Ketiga*, kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dengan adanya penegakan supremasi hukum yang dilakukan dari aparat penegak hukum masyarakat harus bisa sadar bahwa dengan adanya perbuatan kriminalitas maka akan menyebabkan dampak negatif di dalam lingkungan masyarakat karena perbuatan kriminalitas adalah perbuatan yang meresahkan, selain itu masyarakat juga harus sadar dengan ganjaran hukuman yang sudah menanti apabila dia melakukan perbuatan kriminalitas, dengan ganjaran hukuman yang berat diharapkan masyarakat tidak akan pernah melakukan perbuatan kriminalitas.

### **Persantunan**

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis agar sukses baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudarku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Bonger, W.A. 1995. *Pengantar Tentang Kriminolog*, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

#### **Jurnal Penelitian/Karya Ilmiah**

- Andriansyah, (2016) “Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak ( *Stricht Libiality*) dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Januari, Tahun 2016, hal. 4.
- Fatimah, Fines dan Barda Nawawi Arief, (2016) “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Libiality*) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Nomor 2, Januari 2016, hal. 34.